

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEDURANG ILIR KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Oleh:

Sunando Yahya¹⁾, 1, Henny Aprianty²⁾, Edi Darmawi*³⁾

Program Studi Administrasi Publik FISIPOL Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia

Informasi Artikel

Tulisan dikirim

Tanggal 24-Juni-2023

Tulisan direvisi

Tanggal 10-November-2023

Tulisa diterima

Kembali tanggal 31-Desember-
2023

Korespondensi penulis

Email :

edidarmawi@unihaz.ac.id

Kontak Seluler:

0812-7930-5199

Abstract

The purpose of this study was to determine the application of the healthy Indonesia card program to health services at the Kedurang Ilir Health Center, South Bengkulu Regency. The research method used is a qualitative approach with a descriptive research type. Data collected in the form of interviews and documentation with several informants. Data analysis uses data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The results of the implementation of the Kedurang Ilir Health Center in South Bengkulu Regency have not been implemented optimally, this is due to unfulfilled variables such as network connections, but the response from this implementation has been good, the resources are sufficient, the decision making has been determined, the implementation of the program is carried out in detail and well.

Keywords:

Service, Implementation, Healthy Indonesia Card Program

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan program kartu Indonesia sehat pada pelayanan kesehatan dipuskesmas Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa wawancara dan dokumentasi dengan beberapa informan. Analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil Implementasi dipuskesmas Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan diimplementasikan belum secara maksimal, hal ini disebabkan variable yang belum terpenuhi seperti koneksi jaringan, namun respon dari implementasi ini sudah baik, sumberdaya juga sudah cukup, pengambilan keputusan sudah ditetapkan pelaksanaan program dilaksanakan secara rinci dan baik.

Kata kunci:

Pelayanan, Implementasi, Program Kartu Indonesia Sehat

Pendahuluan

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, memiliki peran penting dalam mengelola pelayanan kesehatan masyarakat. Mengingat khususnya di daerah penyerahan urusan kesehatan menjadi kewenangan daerah, dengan desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah (Purnawan et al., 2022).

Pelayanan didalam bidang kesehatan adalah salah satu bentuk kongret pelayanan publik. Pelayanan publik harus di laksanakan oleh pemerintah sebagaimana hak kebutuhan dasar masyarakat terutama masalah kesehatan, seperti yang kita ketahui permasalahan kependudukan terbesar yang di hadapi pemerintah sekarang ini adalah kesehatan, yang mana kesehatan merupakan sebuah investasi bagi negara, dalam arti hanya manusia sehat baik jasmani dan rohani yang dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Upaya pemerintah ini kemudian disampaikan dengan diselenggarakannya Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) agar bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat lebih sehat dan sejahtera, berdasarkan (*Undang-Undang NO. 40 Tahun 2014*), Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan (*Undang-Undang No. 71 Tahun 2013*), tentang pelayanan Kesehatan pada jaminan kesehatan, dimana pelayanan kesehatan ini meliputi semua fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas tingkat rujukan yang bekerja sama dengan BPJS. Dalam hal ini kemampuan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, efisien, efektif, dan bertanggung jawab. (*Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Paragraf Nomor 4 (A4)*).

Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia memiliki Kebijakan Program Pembangunan yang telah dituangkan dalam Program Nawa Cita Presiden Joko Widodo yakni

untuk membangun NKRI sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sektor kesehatan merupakan salah satu dari sektor vital yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia selain dua sektor lain dalam nawacita yakni pendidikan dan sektor sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa pelayanan Kesehatan merupakan salah satu aspek dari hak asasi manusia, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam (*UUD 1945 Pasal 28*) ayat (1) : setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dengan amanat tersebut maka pemerintah wajib melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara dengan melalui berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak terutama dibidang kesehatan (Siregar et al., 2022). Pelayanan dibidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat (Triyanto et al., 2021).

Oleh karena itu pelaksanaan kesehatan di Indonesia sangat penting untuk dilaksanakan dengan tujuan agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia dalam perwujudan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat

(Purnawan, 2014). Masyarakat di Indonesia merupakan kalangan masyarakat yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah yang tentu saja rentan terhadap berbagai permasalahan kesehatan seperti terbatasnya akses untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan (Triyanto et al., 2021).

Hal tersebut berdampak bagi kehidupan masyarakat itu sendiri seperti rendahnya kemampuan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, rendahnya upaya pencegahan penyakit dan perilaku hidup sehat dikalangan masyarakat, rendahnya pengetahuan tentang berbagai gejala dan jenis penyakit, rendahnya kualitas lingkungan dan ketidakmerataan penyebaran tenaga kesehatan. Menurut (Sianturi, 2018) Upaya pemerintah ini kemudian disampaikan dengan diselenggarakannya Program Kartu Indonesia Sehat yang kemudian disingkat menjadi "KIS".

Maka dari itu Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan Program Kartu Indonesia Sehat berdasarkan (*Intruksi Presiden No. 7 Tahun 2014*), tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. Dalam pelaksanaannya pemerintah telah menunjuk BPJS sebagai penyelenggara, sedangkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah programnya. Dimana Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini sebagai penyempurnaan Program BPJS khususnya peserta penerima bantuan iuran.

Dalam perkembangannya, mengacu pada rencana strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 dan arah perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) terdapat dua program sebagai implementasinya yaitu program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Seperti yang kita ketahui sebelum program Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjadi program sah Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan telah lebih dahulu melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional dan bertanggungjawab penuh kepada Presiden.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang

bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan. Dalam Peraturan (*Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014*), tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas berfungsi menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama. Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dinas kesehatan kabupaten/kota, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, akan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan. Teknis pelayanan kesehatan Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang utama bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS), Teknisnya yaitu sistem rujukan berjenjang, pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS) bisa memeriksakan kesehatan diri di puskesmas, jika terdapat masalah kesehatan yang tidak dapat ditangani di puskesmas maka dapat meminta rujukan berobat untuk mendapatkan fasilitas yang maksimal seperti rumah sakit. Seperti yang kita ketahui puskesmas memiliki sarana dan prasarana yang tidak memadai maka dari itu diberlakukan sistem rujukan agar bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam pelayanan kesehatan.

Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) muncul sebagai bentuk penyempurnaan program BPJS Kesehatan khususnya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kartu Indonesia Sehat (KIS) dikeluarkan untuk merekap atau mendata seluruh masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga dengan diterapkannya program Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini diharapkan tidak ada lagi hambatan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Penerapan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) menimbulkan beberapa pandangan yang meragukan penerapan program tersebut. Sama halnya pada penerapan program BPJS Kesehatan dengan sistem rujukan yang berjenjang menempatkan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai fasilitas kesehatan primer atau tingkat pertama.

Pelayanan kesehatan tingkat pertama tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya sarana yang memadai. Mengingat program Kartu Indonesia Sehat (KIS) didasarkan pada sistem rujukan, maka tentunya hal ini akan menjadi ancaman karena dengan keterbatasan sarana dan prasarana maka Puskesmas tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal sehingga mengakibatkan pelayanan kesehatan terpusat di Rumah Sakit saja.

Keterbatasan alat kesehatan, kondisi Puskesmas yang tidak kondusif, bahkan minimnya penggunaan Teknologi Informatika dalam menunjang pelayanan kesehatan tentunya akan berdampak pada kesuksesan penerapan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Puskesmas.

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan kalangan masyarakat yang berasal dari kelas ekonomi menengah kebawah, yang tentu rentan terhadap berbagai permasalahan kesehatan seperti terbatasnya akses untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa deskriptif (Creswell dalam (Purnawan, 2021)) dan berlokasi di Puskesmas Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan. Sumber Data Primer dan Sekunder (Sugiyono, 2013) dari kepala Puskesmas, pegawai Puskesmas, dan masyarakat yang mempunyai kartu Indonesia sehat. Penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti, buku, majalah ilmiah dan dokumen dokumen (Sugiyono, 2016) dari pihak yang terkait masalah implementasi program kartu Indonesia sehat.

Teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi (Creswell, 2013). Analisis data dengan proses seleksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan (Creswell, 2014).

Hasil dan Pembahasan

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT PADA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KEDURANG ILIR KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

1. Content of Policy:

a. Interest Affected (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)

Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

Pelaksanaan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Puskesmas Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, dari segi kepentingan sesuai yang dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan narasumber pelaksana kebijakan, bahwa kebijakan ini didasari oleh keinginan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para masyarakat menengah kebawah dalam hal pelayanan kesehatan. Hal ini didasari oleh amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial, dan peraturan-peraturan yang terkait.

Program yang akan dinikmati oleh peserta setelah menjadi peserta pada program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program-program tersebut sangat penting karena mempunyai fungsi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat menengah kebawah atau kurang mampu demi mendapatkan kenyamanan dan

kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. dan lain sebagainya.

Sebagai badan publik yang telah menjadi badan yang mengutamakan keamanan dalam bertugas kepada peserta, BPJS Ketenagakerjaan tentu memiliki partner dari instansi lain baik swasta maupun instansi negeri yang terkait dalam mendukung proses pelayanan kepada peserta. Hal ini tentu didasari oleh kepentingan bersama dalam menjalin mitra kerja yang baik.

Sementara itu dari sisi peserta, mengenai kepentingan yang sangat diharapkan dari program di Kartu Indonesia Sehat (KIS) yaitu menjamin Kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara dengan melalui berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak terutama dibidang kesehatan. Pelayanan dibidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

Kepentingan yang berbeda antara pelaksana program dengan peserta namun saling terkait, menjadi alasan pentingnya program kepesertaan yang saat ini telah dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan yang telah berubah menjadi badan publik. Oleh karena itu pelaksanaan kesehatan di Indonesia sangat penting untuk dilaksanakan dengan tujuan agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia dalam perwujudan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ibu dr. Desmiwati menambahkan tentang kepentingan dari kerja sama dalam pelayanan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kedurang Ilir itu sendiri dan instansi lain dalam hal ini perangkat desa, dinas sosial dan rujukan rumah sakit lain.

“Saya pribadi selaku Kepala Puskesmas tidak mengambil keuntungan apapun dari program ini, apalagi ini hanya untuk kepentingan yang menyimpang saya tidak pernah, saya hanya menjalankan sebagai mana prosedur yang ditetapkan dan memprioritaskan masyarakat. Tidak tega rasanya jika saya melakukan hal yang menyimpang kesian mereka benar benar membutuhkan. Untuk program KIS ini di tujukan seluruh masyarakat tetapi lebih ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu”. (wawancara 5 Juni 2023 jam 10:00 WIB).

Bidang Kordinator Puskesmas juga mengemukakan : “Saya tidak mengambil apa-apa apalagi saya yang mengobati mereka tidak ada sedikit niat untuk mengambil kepentingan lain yang akan menghambat terkait pelaksanaan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini, program ini untuk semua masyarakat terumata yang kurang mampu”. (wawancara 5 Juni 2020 jam 11:00 WIB).

Pernyataan yang sama ini juga dikemukakan oleh pegawai puskesmas yaitu : “Saya juga sebagai pegawai disini tidak pernah mengambil kepentingan-kepentingan apapun yang menurut saya itu tidak pantas dilakukan, menikmati yang bukan hak kita, jika saya mengambil kepentingan itu berarti saya menari

diatas penderitaan orang lain, untuk target itu sendiri masyarakat yang kurang mampu” (wawancara 5 Juni 2023 jam 10:30 WIB).

Dari beberapa pernyataan informan diatas yang dilakukan, Penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak ada kepentingan yang diambil melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh pelaksana, mereka hanya melaksanakan tugasnya masing masing sesuai bidangnya demi keberhasilan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), target sasarnya pun kepada masyarakat menengah kebawah terutama yang kurang mampu. Pelayanan yang diberikan oleh pegawai Puskesmas sudah sesuai dengan SOP yang telah dibuat, kecuali jika ada pasien yang penyakitnya sudah parah maka akan di dahulukan untuk dirujuk kerumah sakit tanpa menunggu surat rujukan.

b. Type of Benefits (Tipe Manfaat)

Pada poin ini *Content of Policy* berupaya untuk menunjukan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

Kebijakan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat yang dilaksanakan di Puskesmas Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, mendapat respon yang baik dari para peserta yang terdaftar dengan antusias. Seperti yang dikatakan oleh para narasumber bahwa rasa kepuasan ketika melihat para peserta dengan antusias yang bagus maka para pelaksana pun juga merasakan semangat dalam mensukseskan kebijakan ini. Sebagai pelaksana kebijakan mereka hanya melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai pelayan kesehatan masyarakat di Puskesmas Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan. Sementara dari narasumber peserta kebijakan kepesertaan di program Kartu

Indonesia Sehat menjelaskan tentang manfaat yang dirasakan bahwa dengan adanya program Kartu Indonesia Sehat (KIS) mereka merasa aman dan nyaman tidak memiliki kendala untuk berobat tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun, cukup menggunakan Kartu saja.

Manfaat yang dirasakan oleh peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) dapat dikatakan sangat baik. Dan pada dasarnya mereka saling mengerti dari tujuan kebijakan kepesertaan program Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Pada point ini sangat dijelaskan bagaimana manfaat yang dirasakan berdampak positif dari suatu peimplementasian kebijakan yang dilaksanakan. Kebijakan yang dibuat harus ada landasan hukum yang dapat merubah lebih baik dari sebelumnya, serta suatu kebijakan juga bermanfaat dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat. Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri memberikan jaminan kesehatan secara gratis bagi msayarakat yang kurang mampu agar bisa mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan, penentuannya ditentukan oleh pemerintah dan ditanggung pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan mengemukakan : “Tidak usah takut berobat ketika tidak ada uang, cukup membawa kartu jaminan kesehatan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis karena sudah ditanggung pemerintah, tentu hal ini sangat memberi manfaat yang diperoleh untuk peningkatan kualitas kerja pegawai serta masyarakat yang kurang mampu. (wawancara 5 Juni 2023 jam 10:00 WIB). Adapula pegawai Puskesmas juga mengemukakan tentang manfaat yang diperoleh dari Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah : ”Semua masyarakat

kini dapat merasakan pelayanan kesehatan dipuskesmas secara gratis dan dilayani dengan maksimal, tentunya memiliki manfaat yang besar bagi mereka. (wawancara 5 Juni 2020 jam 11:00 WIB).

Kemudian peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai target dalam sasaran Program ini mengemukakan manfaat yang diperoleh : “Sebagai masyarakat pengguna kartu KIS saya merasakan manfaat yang sangat besar karena dapat berobat dengan mudah dan mendapatkan pelayanan secara tanpa harus membayar hanya dengan membawa kartu Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepuskesmas. (wawancara 5 Juni 2023 jam 11:30 WIB).

Peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang lain juga mengemukakan : “Manfaat yang saya rasakan, dulu mau berobat harus mikir karena tidak punya uang, sejak ada program Kartu Indonesia Sehat (KIS) saya mudah untuk berobat karena gratis. (wawancara 5 Juni 2023 jam 12:30 WIB). Berdasarkan informasi dari wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pegawai Puskesmas sebagai pelaksana tidak memperoleh manfaat apapun, mereka hanya implementor dalam pelaksanaan program ini. Beda halnya dengan mereka yang menjadi target dalam pelaksanaan program ini, mereka sangat merasakan manfaatnya apalagi mereka yang ekonominya kebawah dapat memperoleh pelayanan secara gratis tanpa harus menahan rasa sakit yang dirasakan lagi.

c. *Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)*

Dalam hal ini suatu kebijakan sangat penting untuk menentukan perubahan yang ingin dicapai dalam suatu target pelaksanaan kebijakan. Point ini membahas seberapa besar perubahan yang ingin dicapai dan kebijakan tersebut harus mempunyai skala yang jelas. Program Kartu Indonesia Sehat (KIS)

menginginkan perubahan meningkatkan kesehatan dikalangan masyarakat khususnya yang kurang mampu guna memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis. Dengan adanya program ini akan sangat membantu meningkatkan mereka hidup lebih sehat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh pegawai Puskesmas terkait dengan perubahan yang diharapkan dengan adanya program ini : “Di harapkan pelayanan kepada peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini dapat ditingkatkan, selain itu semoga peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) dapat benar-benar terbantu dengan adanya program ini dan bisa memperbaiki pola hidup mereka agar lebih memerhatikan kesehatannya. (wawancara 5 Juni 2023 Jam 10.30 WIB).

Sehubung dengan adanya perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan program peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga mengatakan : “Saya rasa Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dilaksanakan ini sudah baik, harapan kedepannya semoga lebih baik lagi. (wawancara 5 Juni 2023 Jam 11.30 WIB). Peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) lainnya juga mengemukakan : “Harapan saya semoga bisa meningkatkan system pelayanan baik perilaku pegawaimaupun ketersediaan sarana dan prasarana. (wawancara 5 Juni 2023 Jam 12.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, terkait perubahan yang diharapkan peneliti menyimpulkan bahwa Pegawai Puskesmas sebagai pelaksana program ingin memberikan yang terbaik kepada peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) agar merasakan pelayanan yang maksimal, kemudian harapan peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah meningkatkan pelayanan agar lebih baik dari segi pegawai maupun dari segi sarana prasarana.

d. *Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)*

Dalam suatu kebijakan pengambilan keputusan juga sangat penting, maka dari itu harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan. Dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku demi kepentingan bersama. Keputusan ini dinilai tepat atau tidaknya sasaran yang ditetapkan, Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah tepat sasaran dalam mengatasi masalah yang ada dimasyarakat kurang mampu didalam bidang kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan mengemukakan : “Menurut saya program Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini sudah tepat berada di Puskesmas Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan karena fasilitas juga sudah memadai selayaknya fasilitas tingkat pertama yang bersistem rujukan. Dengan ini juga permasalahan mereka yang ingin berobat yang terhalang biaya dapat terselesaikan. (wawancara 5 Juni 2023 Jam 10:00 WIB).

peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga mengemukakan pendapat : “Menurut saya letak program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Puskesmas Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan sudah tepat, karena satu satunya Puskesmas yang berada dikecamatan Kedurang Ilir, dan Puskesmas memang memiliki fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bersistem rujukan, jadi apabila kita ingin berobat ke rumah sakit kita harus minta surat rujukan dulu ke Puskesmas. (wawancara 5 Juni 2023 Jam 11.30 WIB).

Ditambahkan peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) lainnya : “Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah tepat dipuskesmas, karena puskesmas tingkat pertama untuk berobat” (wawancara 5 Juni 2023 Jam 12.30 WIB).

Menurut dari hasil wawancara informan diatas, Penulis menyimpulkan bahwa Kartu Indonesia Sehat (KIS) tepat dilaksanakan di Puskesmas Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai fasilitas tingkat pertama, dimana program kesehatan yang berjenjang. Untuk itu program Kartu Indonesia Sehat (KIS) layak dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini juga merupakan solusi bagi masyarakat miskin yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan karena terbatasnya ekonomi.

e. Program Implementer (Pelaksana Program)

Pelaksana program merupakan faktor penting yang berperan dalam menjalankan atau mengimplementasikan kebijakan. Dalam melaksanakan suatu kebijakan diperlukan adanya pelaksanaan program demi keberhasilan suatu kebijakan yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaan ini sangat diharapkan penggerak atau alat untuk mencapai suatu keberhasilan. Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) secara langsung dilaksanakan dipuskesmas Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dikatakan pelaksana adalah penyedia dan yang memberi pelayanan kepada masyarakat dalam suatu program. Berdasarkan hasil wawancara Kepala Puskesmas Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan mengemukakan : “Pelaksana program Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah seluruh pegawai Puskesmas, tetapi dalam proses pelaksanaan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) terkait dengan Masyarakat, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah. (wawancara 5 Juni 2023 Jam 10:00 WIB).

Dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) terkait dengan Masyarakat, Tenaga Kesehatan

(pegawai), Dinas Kesehatan serta Pemerintah Daerah

f. Resources Committed (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)

Dalam implementasi suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang memberikan pengaruh positif untuk mensukseskan suatu kebijakan. Sumberdaya yang memadai akan mempermudah untuk mencapai tujuan dan akan berjalan dengan baik apabila sumber daya memenuhi secara maksimal. Tidak hanya itu sumber daya yang dibutuhkan juga harus yang berkualitas dengan kemampuan yang baik untuk menjalankan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Puskesmas Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan mengatakan : “Sumber daya menurut saya sudah cukup, untuk fasilitas juga sudah sesuai standart Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama tetapi jika berbicara sarana prasarana hanya saja koneksi jaringan seperti wifi kurang, ini sangat dibutuhkan agar mempermudah dan mempercepat kinerja kami. Untuk kendala tentu ada, karena ada pasien yang ingin disegerakan padahal semua perlu proses, kita juga ingin sudah memberikan yang terbaik tetapi ada saja yang kurang sabaran. (wawancara 5 Juni 2023 Jam 11.00 WIB).

Sehubung dengan hal itu pegawai puskesmas lainnya juga mengatakan : “Menurut saya sumber daya sudah cukup, sarana dan prasarana sudah memadai sesuai standar fasilitas Puskesmas. Untuk kendala ya itu tadi ada orang yang gak sabaran, mereka ingin memaksakan kehendaknya. (wawancara 5 Juni 2023 Jam 10.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa suatu pelaksanaan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus diperlukan implementor yang mempunyai ahli dalam bidang kesehatan,

pendidikan, komunikasi yang baik, serta memiliki etika moral dan yang pasti professional dalam melaksanakan tugasnya. Hal lain juga penulis amati adalah harus paham dengan komputer agar mempermudah dalam berkomunikasi apabila harus mengurus system rujukan, sarana prasana sangat diperlukan dalam kinerja seperti wifi dan koneksi jaringan internet lainnya.

2. Context of Policy:

a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)

Dalam suatu pelaksanaan suatu kebijaka tidak lepas dari kekuasaan, kepentingan dari para aktor, baik dari pembuat kebijakan, atau pelaksana kebijakan tersebut baik langsung ataupun tidak langsung. Kepentingan ini digunakan untuk memperlancar jalannya pelaksanaan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Puskesmas Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan mengenai strategi yang dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) : “Menurut saya cukup membantu dalam pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu, strategi yang kami berikan selalu yang terbaik agar tidak sampai dirujuk ke rumah sakit. (wawancara 5 Juni 2023 Jam 11.30 WIB).

Peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga mengemukakan pelayanan yang mereka peroleh atas strategi yang dilibatkan : “Pelayanan yang mereka berikan sudah baik, dan mereka juga ramah terhadap pasien, mereka selalu memberikan yang terbaik semaksimal yang mereka bisa.

(wawancara 5 Juni 2023 Jam 11.30 WIB).

Peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) lainnya juga mengemukakan : “Penanganan yang mereka berikan cepat dan tanggap, misalkan ada pasien yang kondisinya parah, pegawai langsung membawa kerumah sakit tanpa harus melalui Puskesmas (wawancara 5 Juni 2023 Jam 12.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas, penulis berpendapat bahwa banyak strategi yang telah dilakukan pegawai Puskesmas Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Pegawai Puskesmas juga sangat mendukung dengan adanya program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin ini dalam memperoleh pelayanan kesehatan guna mengurangi angka kematian. Upaya yang mereka lakukan juga mensosialisasikan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada masyarakat, memberikan pelayanan secara maksimal kepada peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) tanpa harus membeda-bedakan. Sementara itu, strategi yang digunakan BPJS dalam upaya melaksanakan program kepesertaan, telah di upayakan semaksimal mungkin oleh Instansi terkait.

b. *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa)

Dalam suatu kebijakan lingkungan juga sangat berpengaruh dilaksanakannya suatu kebijakan karena karakteristik dari lembaga mempengaruhi kebijakan. Karakteristik yang dimaksud dalam

hal ini harus sesuai dengan tugas dan pokok masing-masing yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Peneliti dalam hal ini bagaimana peran kepala Puskesmas sebagai pemimpin dalam mempengaruhi kinerja pegawai untuk mewujudkan keberhasilan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Puskesmas Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Puskesmas mengemukakan : “Saya sebagai Kepala Puskesmas sudah melakukan tugas dengan baik, bagaimana saya mendukung dan memotivasi pegawai dalam menjalankan tugasnya masing-masing, apalagi dengan program ini saya tekankan agar tidak ada perbedaan dalam pelayanan kepada masyarakat. (wawancara 5 Juni 2023 Jam 10.00 WIB).

Pegawai Puskesmas Juga mengatakan “Sebagai Kepala Puskesmas dalam mengambil keputusan cukup adil dalam keberhasilan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini, beliau juga sering memotivasi pegawai dan selalu mengingatkan agar tidak membedakan dalam memberikan pelayanan” (wawancara 5 Juni 2023 Jam 11.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepala Puskesmas sangat penting dalam suatu keberhasilan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), beliau berlaku adil dan selalu memotivasi agar pegawai selalu semangat dan juga agar selalu mengingatkan bahwa jangan membedakan pelayanan semua sama.

c. *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)

Bagi peneliti ini sangat penting dalam proses pelaksanaan kebijakan, dimana harus adanya kepatuhan dan respon dari pelaksana. Pembahasan dipoint ini sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana. Hal ini juga dapat menilai pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pengimplementasiannya. Agar program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dapat dilaksanakan secara baik, optimal dan berdaya guna.

Berdasarkan hasil wawancara terkait kepatuhan dan respon Kepala Puskesmas mengemukakan : “Sejauh ini sudah baik, pegawai sudah menjalankan program dengan semaksimal mungkin, Kepatuhan juga sudah baik meskipun terkadang ada kelalaian dari mereka, semoga kedepannya dapat diperbaiki. (wawancara 5 Juni 2023 Jam 10.00 WIB).

Peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga mengemukakan tentang kepatuhan dan respon bahwa : “Kinerjanya sudah baik, meskipun terkadang mereka ada yang datang terlambat, tetapi tidak jadi masalah mereka tetap memberikan pelayanan yang baik. (wawancara 5 Juni 2023 Jam 11.30 WIB).

Peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) lainnya juga berpendapat : “Mereka melayani dengan ramah, tapi ada juga yang tidak ramah mungkin mereka lagi ada masalah dirumah sehingga dibawa kepekerjaan, menurut saya sih gak masalah karena itu tidak setiap hari begitu. (wawancara 5 Juni 2023 Jam 12.30 WIB).

Berdasarkan informasi dari wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa walaupun ada pegawai yang kinerjanya kurang, namun tak menutup kemungkinan

mereka tetap memberikan pelayanan yang terbaik, harapannya semoga kedepannya lebih bak lagi terhadap kinerja dan respon.

KENDALA DALAM PENGIMPLEMENTASIAN PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT(KIS) PADA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KEDURANG ILIR KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

Dalam pengimplementasian tentu saja masih banyak kendala-kendala yang dihadapi, faktor penghambatnya dapat dilihat dari teori Grindle yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Hanya Ada beberapa kendala dalam pengimplementasian program Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Puruk cahu yaitu seperti kurangnya koneksi jaringan, karena koneksi sangat mempercepat proses kinerja pegawai, ada juga kendala yang dihadapi seperti orang tidak sabar yang selalu ingin di dahulukan.

Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, pertama Content of Policy berkaitan kepentingan dari pelaksana yang ingin memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta serta melaksanakan amanat dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Disamping itu berkaitan manfaat yang dirasakan. Dari peserta yang terdaftar sangat merasakan manfaat dari program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari Pemerintah. Karena peserta yang kurang mampu masih bisa merasakan pelayanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya apapun. Kompetensi pendidikan pelaksana dan komitmen bekerja yang sangat baik dan merata dari setiap pelaksana atau pegawai serta jumlah yang lebih dari cukup yang ada di Puskesmas.

Sementara variabel kedua yaitu Context of Policy, strategi yang serba modern dan maju meskipun dalam sosialisasi masih belum maksimal. Sedangkan dari karakteristik mengutamakan kepentingan peserta dengan sangat responsif, sangat patuh, dan tanggap dalam melaksanakan kebijakan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini. Kebijakan kepesertaan telah mendapatkan respon yang baik dalam mendukung kebijakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diimplementasikan khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Pustaka Pelajar.
- Intruksi Presiden No. 7 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, program Indonesia sehat. (n.d.).
- Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014. (n.d.).
- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Paragraf Nomor 4 (a4). (n.d.).
- Purnawan, H. (2014). TRANSFORMASI PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KANTOR CABANG DARMO SURABAYA (Studi Pada Implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial). *Publika*, 2(3). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/8372>
- Purnawan, H. (2021). *Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages , Lahat Regency , Indonesia*. 06(1), 1–9.
- Purnawan, H., Noviyanto, H., & Tauran. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN MULAK ULU KABUPATEN LAHAT. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 11(2), 229–237.
- Sianturi, D. (2018). Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat pada Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Dolok. In *Administrasi Publik*.
- Siregar, B., Sakti, B., Darmawi, E., & Purnawan, H. (2022). *Implementation of Regulation of the Minister of Health Number 10 of 2021 in Giving Vaccines (Study at Bhayangkara Hospital Bengkulu) Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Dalam Pemberian Vaksin (Studi di Rumah Sakit Bhayangkara B*. 1(1), 19–28.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. (p. 118).
- Triyanto, D., Purnawan, H., Saputra, B., Padang, U. N., Governance, G., Publik, P., Bengkulu, K., Governance, G., Service, P., & City, B. (2021). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu Application of Good Governance Principles in Public Services At the Betungan Community Health Center , Bengkulu City. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*.
- Undang-undang NO. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem jaminan Sosial Nasional. (n.d.).
- Undang-undang No. 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan. (n.d.).
- UUD 1945 Pasal 28. (n.d.).